PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Survei Pada Dinas Kota Bandung)

THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS TO FINANCIAL STATENTES QUALITY AND THE IMPLICATIONS OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY PERFORMANCE (Survey On Goverbment Office Bandung)

Oleh:
YULIA ASTUTI
21112801

Progran Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2016

ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Bandung with respondents 66 people. The phenomenon that occurs is the case findings weakness Internal Control System so as to reduce the quality of financial reporting and disclosure shortcomings in the report that can be compared so that it can reduce the assessment of performance accountability of government agencies.

The purpose of this study is to analyze and assess how much influence the internal control system of the quality of financial statements and the implications on performance accountability of government agencies survey at the Department of Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the internal control system variables, the variable quality of financial reporting and the variable performance accountability of government agencies. To determine the influence of the internal control system of the quality of financial reporting implications on performance accountability of government agencies do statistical testing. Statistical test used is path analysis, validity, reliability, and hypotheses using IBM SPSS Statistics software V.23.

The results showed that the internal control system with the positive direction of significant influence on the quality of financial reporting and the quality of financial reports have a significant effect with positive direction towards performance accountability of government agencies at the Department of Bandung.

Keywords: Internal Control System, Quality of Financial Statements, Government Agencies Performance Accountability.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (Mursyidi, 2013:31). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangannya, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2010:2) terkait dengan tugas untuk menegakan akuntabilitas khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggunggjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik (Indra, 2010:20). Istilah reformasi adalah cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan

pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam *good governance* (Indra, 2010:20). Ungkapan pemerintah yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah (Indra, 2010:20).

Pemprov Jabar masih belum bisa meraih predikat A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi. Pemprov Jabar hanya mendapat predikat BB dengan perolehan nilai 70,06. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyatakan, perolehan poin Jabar tahun 2015 justru merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Yuddy Chrisnandi, 2015).

Pada Kota Bandung sendiri tidak luput dari keberhasilan ataupun kegagalan dalam menjalankan misi organisasi pada instasi pemerintah sebagai contoh kegagalan dalam misi organisasi yaitu program kegiatan terjadi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung yang tidak berjalan. Ridwan Kamil mengatakan bahwa saya hari ini memberhentikan Kadishub Ricky Gustijadi. Surat keputusannya sudah ditandatangani. Lebih lanjut Ridwan Kamil menegaskan pemecatan atas Kadishub tersebut karena banyak agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai, laporan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, beberapa di antaranya adalah terkait marka jalan, taksi yang tidak berargo, taksi monopoli, Trans Metro Bandung (TMB) yang tidak berjalan maksimal, hingga pembangunan cable car. Sehingga dengan berat hati tidak bisa untuk terus di posisi itu (M. Ridwan Kamil, 2016).

Kualitas laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah (Dodi Fs Lumentut dkk, 2014). Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Mahmudi, 2010:11,12).

Beberapa permasalahan Pemerintah Daerah (Pemda) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK yang masih ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Ajaran (LKPD TA) 2014 hampir di seluruh Pemda termasuk Kota Bandung terkait lemahnya prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kekurangan dalam pengungkapan laporan yang dapat dibandingkan juga keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah (Cornell S. Prawiradiningrat, 2015).

Laporan Keuangan yang disajikan harus berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Susilawati dkk, 2014). Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Rika Pamela, 2013) mengatakan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan menurut (Nafi' Inayati Zahro, 2010) menyatakan hal ini menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di SKPD.

Secara garis besar penyebab LKPD (kabupaten/kota) tidak memperoleh opini WTP pada Tahun 2014 (hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2015) antara lain permasalahan pengelolaan akun kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta aset tetap. LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta lemahnya sistem pengendalian intern. (IHPS I Tahun 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas Kota Bandung.
2) Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Kota Bandung.
2) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas laporan keuangan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas Kota Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pengertian Sistem pengendalian Intern

Menurut Nurmalia Hasanah, dkk (2016:131) mengatakan bahwa:

"Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:129), Sistem pengendalian intern adalah:

"Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen."

Lebih lanjut pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Mahmudi (2010:20)

"Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peratura perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

Komponen Sistem Pengendalian Intern

Mahmudi (2010:20-22), bahwa komponen sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

2. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara

efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terusmenerus.

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Deddy (2010:96) kualitas dalam Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar menyatakan: "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan"

Menurut Fahmi (2011:2) pengertian laporan keuangan sebagai berikut:
"Merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Adapun menurut Mahmudi (2010:10) definisi laporan keuangan adalah:
"Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas".

Lebih lanjut Indra Bastian (2010:9) menjelaskan laporan keuangan dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik ialah:
Laporan keuangan adalah hasil akhir dalam proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan yang diambil agar dapat lebih berkualitas.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengeroksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keauangan entitas pelaporan lain pada umunya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Rudi M. Harahap (2013:19) dalam buku Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sertor Publik menerangkan sebagai berikut:

> "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/kegagalan misi organisai/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban".

Menurut Deddi Nordiawan (2010:169) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menerangkan bahwa:

> "Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menguraikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan".

Menurut (SK Kepala LAN 2003) dalam Rina Yulianti (2012) menyatakan bahwa:

> "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik".

Sedangkan menurut Mohamad Mahsun (2006:83) dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik mengartikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

> "Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan/kegagalan kinerja selama satu periode yang telah terjadi.

Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Masukan *(Input)*

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Proses *(Process)*

Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.

3. Keluaran *(Output)*

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

4. Hasil *(Outcomes)*

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

5. Manfaat *(Benefit)*

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

6. Dampak *(Impact*)

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan terdapat hubungan terkait antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan adalah:

> "Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mursyidi (2013:59) dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia menyatakan bahwa:

> "Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas".

2.3. Hipotesis

Sugiyono (2013:30) menyatakan bahwa "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah diyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhdap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan alat uji statistik yaitu analisis jalur (*path analysis*).

Menurut Sugiyono (2014:147) mendefinisikan metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Menurut Sugiyono (2012:8) menjelaskan metode verifikatif adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Menurut Sugiyono (2014:8), menjelaskan pengertian metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

3.2. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2014:38) menjelaskan definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Maka terdapat tiga variabel yang akan diukur, yaitu:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2014:39) mengemukakan pengertian variabel independen (bebas) adalah sebagai berikut:

"Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sistem pengendalian intern (X) dan kualitas laporan keuangan (Y).

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2014:39), definisi dari variabel dependen (terikat) adalah sebagai berikut:

"Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Z).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 1 hal. 16

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:137) mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen".

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) menjelaskan definisi dari teknik pengumpulan data adalah: Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)
   a. Wawancara *(Interview)*
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara sebagai berikut:

"Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas".

b. Kuesioner
Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:
"Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya"

2) Penelitian kepustakaan *(Library Research)*
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4. Populasi dan Sempel

Menurut Sugiyono (2014:80), mengemukakan pengertian populasi sebagai berikut:
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 17 Dinas Kota Bandung yang terdiri dari, Kepada dinas sebanyak 17 orang, Pegawai bagian akuntansi sebanyak 34 orang, dan subag keuangan sebanyak 17 orang, berjumlah 68 orang. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 68 Pegawai pada Dinas Kota Bandung.

Menurut Sugiyono (2014:81), pengertian sampel adalah sebagai berikut:
"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *nonprobability sampling.* Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2014:85) pengertian dari sampling jenuh adalah sebagai berikut:
"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalh sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 68 responden, maka dapat digambarkan penarikan sempel dapat dilihat pada tabel 2 lampiran 2 hal. 17.

3.5. Metode Pengujian Data

Uji Validitas

Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masingmasingpernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product moment*.

Adapun rumus dari korelasi pearson adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right]\left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

Sumber: Umi Narimawati, dkk. (2010:42)

Keterangan:

r = Koefisien korelasi *pearson product moment*
X = Skor item pertanyaan
Y = Skor total item pertanyaan
n = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument

Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) dinyatakan Barker *et al*. (2002:70) sebagai berikut:

"Butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasi butir pernyataan ≥ 0,30. Kemudian pengujian reliabilitas menggunakan metode *alpha-cronbach* dan dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitas > 0,70". Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji coba dengan t (taraf signifikasi) adalah 5%.

Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibitas adalah sebagai berikut:

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman-Brown Correlation*) atau Teknik Belah Dua, dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{2r_1}{1 + r_b}$$

Sumber: Sugiyono (2013:131)

Keterangan:

R = *Realibility*
r_1 = Reliabilitas internal seluruh item
r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

3.6. Metode Analisis Data

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

"Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Analisis Deskiptif

Menurut Umi Narimawati (2010:245) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:245)

d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria dapat dilihat pada tabel 3 lampiran 3 hal.18.

Analisis Verifikatif

Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern (variabel X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (variable Y) implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (variabel Z) dapat diketahui dengan menggunakan teknik analisis data statistika.

Langkah-langkah dalam pengujian statistik yang digunakan penulis adalah:

Menurut Juliansyah Noor (2014:97) menjelaskan mengenai definisi analisis jalur (*path analysis*) sebagai berikut:

1) Analisis Jalur (*Path Analysis*)

"Analisis jalur (path analysis) adalah keterkaitan hubungan/pengaruh antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat dimana peneliti mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab variabel lainnya yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Didalam diagram ada gambar panah-panah yang menunjukkan arah pengaruh antar variabel bebas, intervening, dan variabel terikat. Dan biasanya digambarkan dengan tanda panah satu arah".

a. Nilai Korelasi Pearson

Analisis korelasi pearson digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Pengujiannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\mathrm{n}\,(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n\,(\sum yi^2) - (\sum yi)^2\}}}$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:49)

b. Nilai Korelasi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

3.6. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, dengan perumusan sebagai berikut:

a. H_0 : $\rho yx = 0$ Sistem Pengendaian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

   H_a : $\rho yx \neq 0$ Sistem Pengendaian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria pegujian:

Tolak H0 dan terima Ha jika nilai p (Sig.) < α

Terima H0 dan tolak Ha jika nilai p (Sig.) > α

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai thitung untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X) sebesar 6,883 dan nilai p = 1,997. Dikarenakan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya Sistem Pengendalian Intern (X) berpengaruh signifikan terhadap Kulaitas Laporan Keuangan (Y).

b. H_0 : $\rho zy = 0$ Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H_a : $\rho zy \neq 0$ Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kriteria pengujian :
Tolak H0 dan terima Ha jika nilai p (Sig.) < α
Terima H0 dan tolak Ha jika nilai p (Sig.) > α

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai thitung untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 8,001 dan nilai p = 1,997. Dikarenakan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya Kualitas Laporan Keuangan (Y) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Z).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari pengujian yang telah dilakukan hasilnya terdapat hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0.652 yang bernilai positif. Nilai 0.652 menurut sugiyono (2011:250) berada pada kategori cukup tinggi. Artinya, semakin baik sistem pengendalian intern yang dilakukan instansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan itu sendiri akan meningkat.

Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 42,50%. Artinya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 42,50% pada instansi pemerintah di seluruh Dinas yang ada di Kota Bandung, sedangkan sebesar 47,50% sisanya adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti prinsip akuntansi, standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan sistem pengendalian intern terbukti secara statistik dapat meningatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2007:27) Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Lalu menurut Bodar (2005:11) pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan reliabilitas pelaporan keuangan.

Hal ini menjawab fenomena adanya permasalahan terkait lemahnya prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kekurangan dalam pengungkapan laporan yang dapat dibandingkan juga keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah

Hasil dari penelitian ini juga sejalan atau mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), I Putu Upabayu Rama Mahaputra, I Wayan Putra (2014) dan Nafi' Inayati Zahro (2013).

Menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari pengujian yang telah dilakukan hasilnya terdapat hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0.707 yang bernilai positif. Nilai 0.707 menurut sugiyono (2011:250) berada pada kategori tinggi. Artinya, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri akan meningkat.

Terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 50,00%. Artinya kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 50,00% pada instansi pemerintah di seluruh Dinas yang ada di Kota Bandung, sedangkan sebesar 50,00% sisanya adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti agenda reformasi perbaikan, pembangunan marka jalan, taksi tak berargo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan kualitas laporan keuangan terbukti secara statistik dapat meningatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Mursyidi (2013:59), menjelaskan untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Dan menurut Deddi Nordiawan (2010:125), menjelaskan bahwa Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas kinerja sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informaasi keuangan sektor publik

Hal ini menjawab fenomena adanya permasalahan banyak agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai, laporan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, beberapa di antaranya adalah terkait marka jalan, taksi yang tidak berargo, taksi monopoli, Trans Metro Bandung (TMB) yang tidak berjalan maksimal, hingga pembangunan cable car.

Hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh positif ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanis & Sephi Chairunnisa (2013) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lalu Bambang Pamungkas (2012) yang menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan Urip Santoso & Yohanes Joni Pambelum (2008) menyimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

1) Sistem Pengendalian Intern mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kota Bandung, artinya semakin baik Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & kumunikasi, dan pemantauan, maka hal tersebut akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya.
2) Kualitas Laporan Keuangan mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dinas Kota Bandung, artinya semakin baiknya pencatatan dan pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka hal tersebut akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinatah.

5.2. Saran

1) Saran Praktis

a. Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan perlu ditingkatkan penilaian resiko dan informasi serta komunikasi dalam Sistem Pengendalian Intern maksudnya dinas Kota Bandung lebih baik dengan menerapkan pengendalian resiko untuk program kegiatan, yang telah dianggarkan sehingga ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan program kegiatan dinas pada Kota Bandung telah melakukan penaganan dengan pengendalian resiko yang telah dirumuskan pada periode sebelumnya dan Dinas sebaiknya meningkatkan informasi serta komunikasi dalam pelaksanaan laporan keuangan seperti, memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan sebagai bentuk akuntabilitas pada dinas Kota Bandung dengan cara membuat web yang berisi laporan keuangan setiap bulan atau minimal pertiga bulan sekali.

Solusi yang lain adalah meningkatkan evektifitas pengendalian intern seperti kepala dinas (Kadis) memeriksa catatan akuntasi baik keuangan maupun program agar terbentuk tatanan laporan yang baik dari semisal salah entri serta menyajikan laporan keuangan. Dengan pengungkapan laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya serta meningkatkan keandalan laporan keuangan, dengan memperbaiki kekurangan dalam sistem pengendalian intern kemungkinan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan akan dapat diperoleh serta bukan tak mungkin jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga ikut meningkat pada dinas Kota Bandung.

b. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan perlu menanamkan rasa tanggungjawab kepada Kadis maupun jajaran staf atas program kegiatan yang telah disusun pada periode sebelumnya jadi dinas pada Kota Bandung sebaiknya memiliki rasa tanggungjawab atas apa yang telah menjadi program dalam peridore tertentu, pelaksanaan dalam ketepatan waktu juga menjadi saran dari penulis yang diberikan karena awal dari sebuah kegiatan harus dirancang dengan matang sehinga mendapatkan hasil yang juga matang tentu saja didukung oleh proses yang juga matang. Sebaiknya dinas Kota Bandung lebih mempersiapkan program dengan perhitungan yang matang serta menerapkan penilaian resiko dalam penyusunan program kegiatan, serta menyusun laporan sesuai dengan realisasi yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

2) Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

Bordnar, Hoopwod. 2005. *Accounting Information System*. New Jersey: Prentice Hall.

Cooper, Donald R dan Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis.* Jakarta: PT. Media Global.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.

Deddy Mulyana. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Erwan dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Irham Fahmi, 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Jakarta: Alfabeta

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Juliansyah Noor. 2014. Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen. Jakarta: Grasindo.

LAN RI (2003), *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah***.** Jakarta.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____- 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUP STIE YPKN Cetakan pertama.

_____- 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mohamad Mahsun. Dkk. 2006. *Akuntasi Sektor Publik. Edisi Pertama.* Yogyakarta. BPFE.

Muhamad Khusaini. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unbraw.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia.* Bandung. PT Revika Aditama.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung. PT Revika Aditama.

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: IN MEDIA.

Riduwan dan Kuncoro. 2012. C*ara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.

Rudi M. Harahap. 2013. *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sertor Publik.* Jakarta: Buletin Informasi dan Teknologi (bit).

Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S. H. 2008. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian & Pengembanga (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.

_____-. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

_____- 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____- 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____- 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

_____- 2008. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Tantriani Sukmaningrum dan Puji Harto. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2010. metode penelitian *:Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Umi Narimawati, Dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Sumber dari Jurnal:

Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawa. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)* Volume 2 No: 1

Bambang Pamungkas. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Volume 12 No .1, April 2012

Darwanis, Sephi Chairunnisa. 2013. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Vol. 6 No. 2 Juli Hlm. 150-174

Dodi Fs Lumentut, Sahmin Noholo, Amir Lukum.2014. *Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo)*

I Putu Upabayu Rama Mahaputra, I Wayan Putra. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.* ISSN: 2302-8556. Vol 8.2 (2014): 230-244

Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan***.** Trikonomika.Volume 11, No. 1

Nafi' Inayati Zahro. *Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.* ISBN: 978-979-3649-81-8

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)*. Volume 2 No: 1 Tahun 2014

Rika Pamela. 2013. *Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* ISSN : 1693-0827 Vol. 10, No. 02, Agustus 2012 – Januari 2013

Susilawati, Dwi Seftihani Riana. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* ISSN : 1693-4482. Vol XI, No. 1 – 2014

Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)* ISSN : 1693-4482. Vol XI, No. 1 – 2014

Urip Santoso, Yohanes Joni Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.* ISSN:0216–1249 Vol.4, No.1: hal. 14–33

Sumber dari Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34).

_____- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan keuangan daerah.

_____- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokusmedia.

Republik Indonesia. 2006. *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Sumber dari Undang-undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Sumber dari Internet:

www.COSO Internal Control Framework Resources, 2008.

Penyerahan LHP LKPD TA 2014. http://bandung.bpk.go.id/?p=7626. 02 Juni 2015 – 08:52 WIB [25/02/2016]

Ikhtisar Hasil Pemerikasaan Semester Tahun Ajaran 2015. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pf. 5 Oktober 2015 − 15:07 WIB

[25/02/2016]
Banyak Program Tak Berjalan, Emil Copot Kadishub Bandung. http://daerah.sindonews.com/read/1076294/21/banyak-program-tak-berjalan-emil-copot-kadishub-bandung-1452579741. Selasa, 12 Januari 2016 − 13:22 WIB [23/04/2016]
Ridwan Kamil Kembali Copot Dua Pejabat. http://daerah.sindonews.com/read/1083036/21/ridwan-kamil-kembali-copot-dua-pejabat-1454655783. Jum'at, 5 Februari 2016 − 14:03 WIB [23/04/2016]
Temuan BPK Dalam LKPD TA 2014 Perlu Perhatian. http://dprd.jabarprov.go.id/about/news/read/2015/06/08/temuan-bpk-dalam-lkpd-ta-2014-perlu-perhatian.html. 08 Juni 2015 − 14:40 WIB [25/02/2016]
Menpan-RB Malu, Jabar Belum Dapat Nilai A Akuntabilitas SAKIP Provins http://m.galamedianews.com/bandung-raya/71766/menpanrb-malu-jabar-belum-dapat-nilai-a-akuntabilitas-sakip-provins.html. Jumat, 12 Februari 2016 | 18:46 WIB [25/02/2016]

LAMPIRAN

Lampiran 1 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Sistem Pengendalian Intern (X)	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peratura perundang-undangan. Mahmudi (2010:20)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan Mahmudi (2010:20-22)	ORDINAL	1 2 3 4 5
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas Mahmudi (2010:10)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami Mahmudi (2010:11-12)	ORDINAL	6-7 8-9 10 11

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Z)	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic Mohamad Mahsun (2006:83)	1. Masukan (*Input*) 2. Proses (*process* 3. Keluaran (*outpu* 4. Hasil (*outcome*) 5. Manfaat (*benefit* 6. Dampak (*Impac* Mohamad Mahsun (2006:77)	O R D I N A L	12 13 14 15 16 17

Lampiran 2 Sempel

Tabel 2
Daftar Dinas Kota Bandung

No	DINAS KOTA BANDUNG	Kepala Dinas	Bagian Akuntansi	Subag Keuangan
1.	Dinas Pendidikan Kota Bandung	1	2	1
2.	Dinas Kesehatan Kota Bandung	1	2	1
3.	Dinas Sosial Kota Bandung	1	2	1
4.	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	1	2	1
5.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bandung	1	2	1
6.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung	1	2	1
7	Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kota Bandung	1	2	1
8	Dinas Bina Marga & Pengairan Kota Bandung	1	2	1
9.	Dinas Pemakaman &Pertamanan Kota Bandung	1	2	1
10.	Dinas Perhubungan Kota Bandung	1	2	1
11.	Dinas Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung	1	2	1
12.	Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Perdagangan Kota Bandung	1	2	1
13.	DinasPertanian & Pertahanan Pangan Kota Bandung	1	2	1
14.	Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	1	2	1
15.	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Bandung	1	2	1
16.	DinasPengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandung	1	2	1
17.	Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Bandung	1	2	1
Jumlah		**17**	**34**	**17**
Total Jumlah		**68**		

Lampiran 3 Kriteria Persentase Tanggapan Responden

Tabel 2
Kriteria Kategori Kualitas Tanggapan Responden

No	Persentase Skor	Kategori Skor
1	Kuartil III ≤ Skor Total ≤ Skor Maksimal	Baik
2	Median ≤ Skor Total < Kuartil III	Cukup Baik
3	Kuartil I ≤ Skor Total < Median	Kurang Baik
4	Skor Minimal ≤ Skor Total < Kuartil I	Tidak Baik

Sumber: Cooper *et al.* (2006:476)

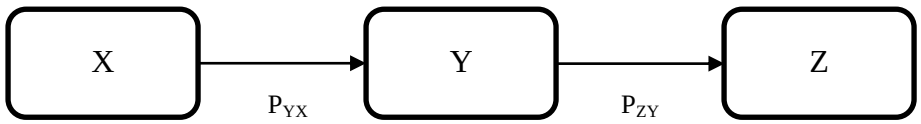
Skor Maksimal = Skor Tertinggi x Jumlah Pernyataan x Jumlah Responden
Skor Minimal = Skor Terendah x Jumlah Pernyataan x Jumlah Responden
Median = (Skor Minimal + Skor Maksimal) : 2
Kuartil I = (Skor Minimal + Median) : 2
Kuartil III = (Skor Maksimal + Median) : 2

Tabel 3
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	81% - 100%	Baik
2	61% - 80%	Cukup Baik
3	40% - 60%	Kurang Baik
4	< 20%	Tidak Baik

Sumber: Cooper *et al.* (2006:476)

Lampiran 4 Analisis Jalur



Sumber: Umi Narimawati (2010:48)

Gambar 3.1
Model Analisis Jalur

Lampiran 5 Output SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.571	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.650	6

Correlations

		Skor_Total
Q1	Pearson Correlation	.575
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q2	Pearson Correlation	.676
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q3	Pearson Correlation	.750
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q4	Pearson Correlation	.704
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q5	Pearson Correlation	.309
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	66

Correlations

		Total_Skor
Q12	Pearson Correlation	.597
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q13	Pearson Correlation	.514
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q14	Pearson Correlation	.697
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q15	Pearson Correlation	.655
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q16	Pearson Correlation	.504
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q17	Pearson Correlation	.716
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66

Correlations

		Total_Skor
Q6	Pearson Correlation	.645
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q7	Pearson Correlation	.628
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q8	Pearson Correlation	.589
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q9	Pearson Correlation	.655
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q10	Pearson Correlation	.779
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66
Q11	Pearson Correlation	.690
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	66

Correlations

		Sistem Pengendalian Intern	Kualitas Laporan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	1	.652	.622
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	66	66	66
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	.652	1	.707
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	66	66	66

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.017	2.557		2.745	.008
	Sistem Pengendalian Intern	.884	.128	.652	6.883	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652[a]	.425	.416	2.36036

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.611	2.049		3.715	.000
	Kualitas Laporan Keuangan	.664	.083	.707	8.001	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 [a]	.500	.492	2.06712

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan